

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan keuangan pemerintah (LKP). Pada dasarnya LKP adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun laporan keuangan pokok berbasis kas menuju akrual yang harus disusun

oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II, meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Fungsi Laporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana bunyi penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Kemudian, Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dalam Bastian (2006) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara

3. Jenis Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh OPD adalah:

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/ barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara

aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/ barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar). Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP (Furqon, 2012)

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/ program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab

terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.2. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Intern Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksiantara orang dan sistem serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik. Menurut Bastian (2009:51) mengemukakan jika pengendalian intern berhubungan dengan pengendalian intern rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek

kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

2.1.3. Kompetensi Staf Akuntansi

1. Pengertian Kompetensi Staf Akuntansi

Sumber daya manusia (*human resources*) merupakan orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Simamora, 2011). Menurut Amirudin (2009), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislative dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan daerah. Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan

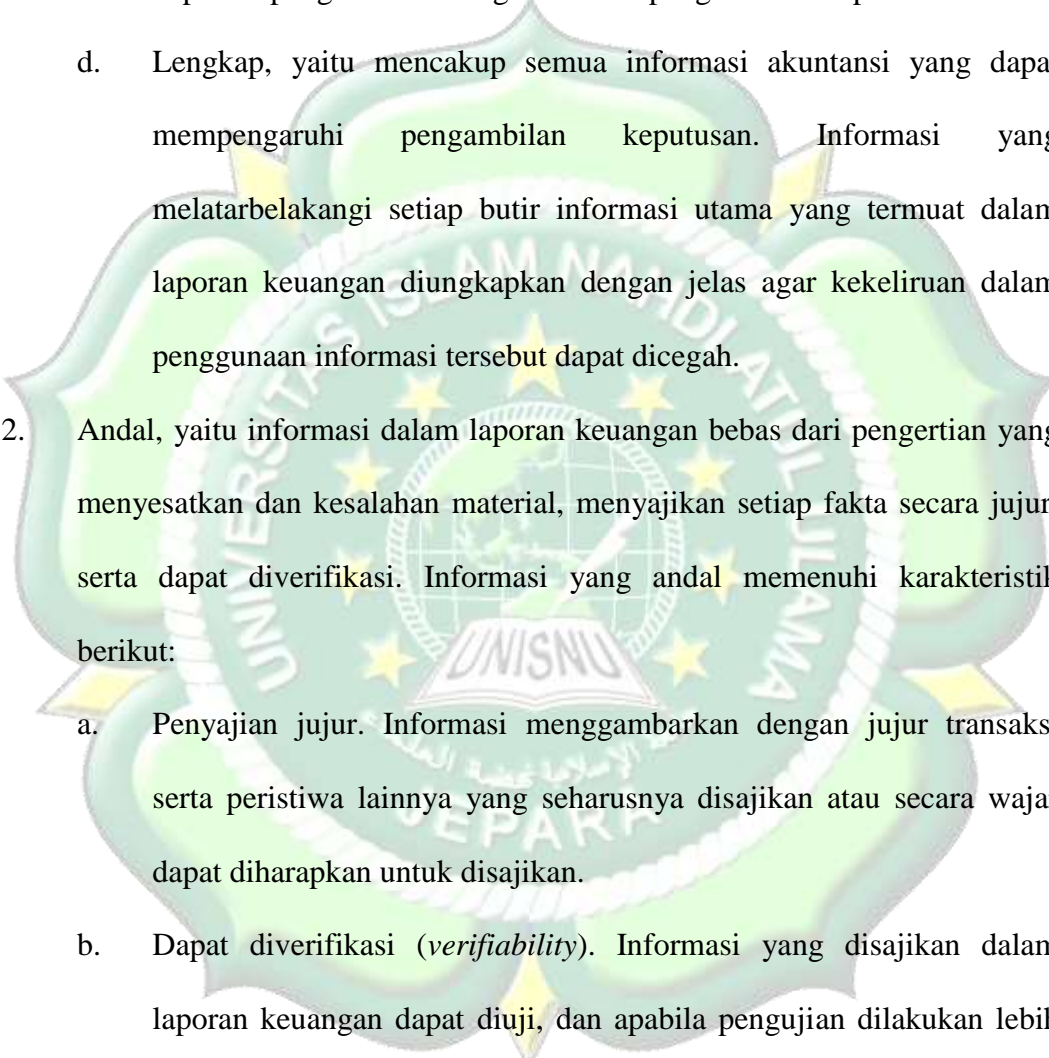
1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya

maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005: KK-10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki yaitu relevan, andal, netral, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam *SFAC No. 2*. Hanya saja SAP menekankan prasyarat normatif yakni:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

- 
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.



2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian Terdahulu
1	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Juwita, 2013)	(X1) SAP (X2) SIA (Y1) Kualitas laporan keuangan	Standar akuntansi pemerintahan dan system informasi akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah (Putra, 2014)	(X1) SDM (X2) SIA (X3) SPI (X4) SAP (Y1) Kualitas laporan Keuangan	SDM, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian intern dan kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng) (Udiyanti, dkk, 2014)	(X1)SAP (X2)SPI (X3)SDM (Y1)Kualitas laporan Keuangan	Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya Terhadap	(X1)SDM (X2)SPI (X3)SAP (Y1) Kualitas laporan Keuangan	Penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas

	Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah” (Studi pada SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah) (Ahsani, 2015)		laporan keuangan
5	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember) (Aprihani, 2015)	(X1)SDM (X2)SPI (X3)SAP Kualitas laporan (Y1) Keuangan	Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD, (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar) (Triwardana, 2017)	(X1)SDM (X2)SIA (X3)SAP (Y1) Kualitas laporan Keuangan	Penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber: (Juwita, 2013), (Putra, 2014), (Udiyanti, dkk, 2014), (Ahsani, 2015), (Aprihani, 2015), (Triwardana, 2017).

Perbedaan penelitian terdahulu Dhedy Triwardana (2017) dengan penelitian saat ini adalah:

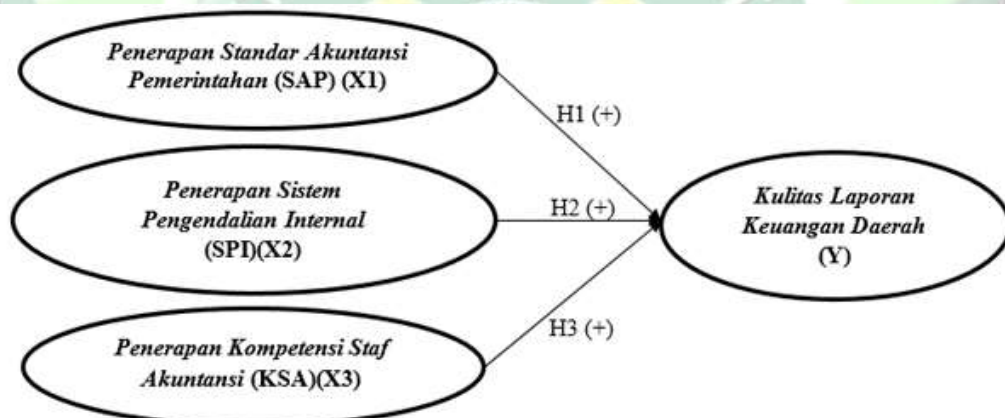
1. Periode waktu penelitian masih baru yaitu dilakukan pada tahun 2019.
2. Sampel yang digunakan adalah dengan melakukan studi pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan setiap OPD akan diambil 2 reponden dengan kriteria Kepala Dinas, Kasubag Keuangan. Kriteria ini didasarkan bahwa tiap-tiap pihak tersebut memiliki tanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

3. Mengganti variabel sistem informasi akuntansi dengan sistem pengendalian internal.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta telaah pustaka, dan juga penelitian-penelitian terdahulu, maka variabel yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4. Perumusan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Dapat disimpulkan bahwa SAP

merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Menurut Udiyanti, dkk (2014). Ahsani (2015), Aprihani (2015), Triwardhana (2017) menemukan jika Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2009) mengemukakan jika pengendalian intern berhubungan dengan pengendalian intern rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan

yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pengendalian yang masih berjalan dengan kurang baik membuat masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/ nilai informasi yang disyaratkan. Pada hasil audit yang dilakukan oleh BPK, sering diberikan opini “tidak wajar dan/ atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengendalian intern untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini agar mendapatkan opini yang baik dan tanpa terkecuali.

Sistem pengendalian intern sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai diharapkan dapat memberikan keyakinan, menjamin akurasi, keamanan, andal dan efektif serta efisien dalam kegiatan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Udiyanti, dkk (2014). Ahsani (2015), Aprihani (2015), Triwardhana (2017) menemukan jika sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif Signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.4.3. Pengaruh Kompetensi Staff Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Kompetensi staff akuntansi adalah kemampuan kompetensi staff akuntansi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Kharis, 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kompetensi dan kemampuan kompetensi staff akuntansi merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Semakin tinggi kompetensi dari sumber daya manusia yang terlihat dari kemampuan dan keterampilannya, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya.

Menurut Triwardana (2017), Ahsani, (2015) dan Udiyanti et.all (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H3: Kompetensi staff akuntansi berpengaruh positif Signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.